INTROSPEKSI

Oleh: YB Mangunwijaya

Sumber: Jawa Pos, 21 Oktober 1996

Sila ke-2 kita kan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil artinya melihat juga posisi kedua atau ketiga belah pihak. Jangan hanya didasari suka tak suka dan dilihat dari kacamata pihak sini saja. Right or wrong my country, slogan perdana menteri kolonial Inggris abad ke-19, sudah kadaluwarsa. Beradab, artinya dengan hati bersih, pikiran bening serta sikap ksatria berbudaya fair play. Dan terpelajar juga.

Introspeksi

Oleh: YB Mangunwijaya
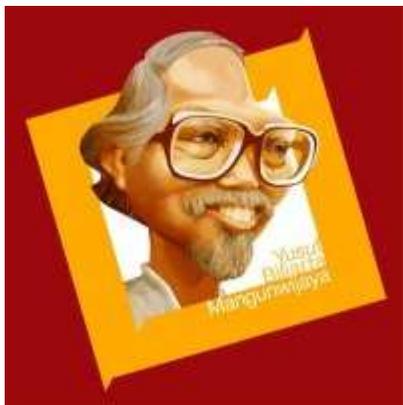
HADIAH Nobel Perdamaian hari-hari pertama banyak mendapat reaksi bernada geram emosional. Dapat Dipahami. Sangat manusiawi. Terpilihnya Uskup Belo seumumnya dapat diterima meskipun suara tidak setuju ada juga. Hanya satu dua yang berani terus terang mengatakan gembira dan bangga. Tetapi bahwa Ramos Horta dipilih juga sejajar dengan Uskup Belo, nah ini membuat kebanyakan dan kita termasuk saya terkejut.

Namun, sekarang sudah kurang lebih seminggu lewat. Mudah-mudahan emosi sudah mereda dan kita bisa membeningkan naluri budi. Sila ke-2 kita kan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil artinya melihat juga posisi kedua atau ketiga belah pihak. Jangan hanya didasari suka tak suka dan dilihat dari kacamata pihak sini saja. *Right or wrong my country*, slogan perdana menteri kolonial Inggris abad ke-19, sudah kadaluwarsa. Beradab, artinya dengan hati bersih, pikiran bening serta sikap ksatria berbudaya fair play. Dan terpelajar juga.

Pertama, Yayasan, Panitya dan Juri Hadiah Nobel (YPJHN) pun manusia-manusia. Bisa salah. Tetapi harus diakui, mereka bukan kaum manipulator, tukang rekayasa atau berkebiasaan serba subyektip like dislike. Pengujian kritis, moral, dan rasa keadilan mereka tinggi. Mengingkari itu atau mencurigai YPJHN pasti justru senjata makan tuan yang melumpuhkan kita sendiri. Kita akan terisolasi di seluruh dunia dan dicap berkadar moral rendah . Juga oleh sahabat-sahabat penduduk ASEAN pun. Kecewa dan merasa terpukul boleh saja, tetapi sudilah jangan menyerang YPJHN dengan argumentasi-argumentasi yang tidak bermutu atau emosi belaka, bahkan menjurus fitnah. Nanti digeleng-gelengkan kepalai karena kita mengukur orang lain dengan baju kita sendiri. Lalu di mana dapat menyembunyikan wajah nanti di dalam pergaulan global?

Kedua, bahwa selalu ada aroma udang politik di dalam segala keputusan juri intemasional apa pun tidak perlu kita ributkan. ltu biasa. Asal tidak frontal melawan hati nurani atau sila pertama, ke-2, dan ke-5 dari Pancasila. Polandia Komunis dulu marah ketika Walesa mendapat hadiah Nobel Perdamaian dan melarangnya pergi ke Stockholm. Istrinya yang mewakilinya. Sama halnya dengan Afrika Selatan Apartheid ketika Uskup Desmond Tutu dihadiahi Nobel Perdamaian. Rusia Soviet juga naik pitam dan melarang Boris Pasternak menerima Hadiah Nobel Sastra, karena dia anti tirani komunis dst. dst. Jika kita bersikap sama dengan mereka, malahan nanti

dianggap bukti bahwa ada sesuatu pada diri kita yang tidak bersih. Apa kita mau disejajarkan dengan Rusia Soviet atau Polandia Komunis atau Afrika Selatan rasis?

Ketiga, Dunia Barat dari sudut apa pun liberal. Liberal ada buruknya tetapi banyak baiknya juga. Mosok di dunia ini yang baik dan benar hanya ada di Indonesia. Hal baik dari iklim liberal (di samping buruknya) ialah terjaminnya kemerdekaan berpikir, berpendapat dan berekspresi. Yayasan Nobel tidak disensor pemerintah atau konglomerat atau kekuasaan politik mana pun. Orang-orang Swedia cukup netral dan sistem mereka tidak kapitalistis tega tulen, bahkan digolongkan sosialis humanis, yang elan demokrasi dan emansipasi manusia amat dihargai. Tidak ada yang sempurna di dunia, tetapi YPJHN sangat independen dan cara kerjanya amat kritis menuntut kesaksian, dokumentasi, bukti-bukti penyelidikan, check rechecking dan pertimbangan yang amat berat, sehingga integritas dan obyektivitas mereka sangat dihormati civitas academica. Meskipun tentu saja gading selalu ada retaknya, dan hanya Tuhan yang Maha obyektif. Apakah kita sendiri tidak sering terlalu subyektif juga? Argumentasi politik untuk mendiskreditkan YPJHN sungguh salah alamat jika yang dimaksud ialah politik kekuasaan, siapa kalah siapa menang. Tetapi ada politik lain dalam arti sesungguhnya dan lebih asli, yang tidak bergerak dalam dimensi kekuasaan atau menang-kalah, yakni perjuangan (seperti yang disebut dalam Pancasila) demi kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat; dalam kasus Nobel, rakyat semua bangsa, suku dan minoritas pun, tanpa pandang ras, agama, golongan dsb. Demi kemajuan ilmu dan budaya sikap. Demi emansipasi dan anti kekerasan, anti tirani anti fasisme dan kejujuran, rekonsiliasi, perdamaian, kemerdekaan, keadilan sosial, kemanusiaan, demokrasi, perlindungan si dina, lemah, miskin dsb. Nah dalam hal-hal politik dalam arti terakhir itulah YPJHN di Stockholm adalah (salah satu, bukan satu-satunya) kewibawaan yang bermartabat tinggi. Tentu saja mereka pun manusia yang dapat keliru dan memerlukan kritik.Tetapi itu tergantung kita juga. Oleh karena itu.

Keempat, sudilah maklum YPJHN hanya menilai calon yang diusulkan resmi serius oleh perorangan dan atau lembaga yang independen dan berwibawa dengan disertai alasan-alasan ilmiah, dokumentasi, serta kesaksian banyak pihak dan tokoh bermartabat/berwibawa juga dalam bidang bersangkutan. Dengan kata lain, lewat pengujian dan lobby kritis resmi maupun pribadi. Maka saya yakin, seandainya ada dari pihak Indonesia atau luar negeri yang mengusulkan Pak Ali Alatas yang amat berjasa dalam soal Kamboja dan Moro misalnya, pasti beliau akan mendapat hadiah Nobel Perdamaian. Soalnya hanya, apakah ada dari pihak Indonesia, Lemhamnas, atau Komnas HAM, atau universitas atau tokoh bermartabat tinggi kita di sini, di Perwakilan PBB atau di mana saja, yang resmi mengusulkan Ali Alatas selaku calon peraih Hadiah Nobel? Lengkap dengan dokumentasi, rekomendasi, dan segalanya yang meyakinkan YPJHN? Kalau tidak ada, jangan hendaknya menyalahkari YPJHN. Di dunia internasional prosedur, pengaruh academic society, pers, radio, TV, lobby, dan jangan lupa desakan para LSM dan lembaga-lembaga swasta, sangat menentukan.

Mengenai Uskup Belo, Pak Ali Alatas sendiri fair menilai: logis beliau dipilih. Tetapi rupa-rupanya lobby pro Ramos Horta lewat Portugal dan beberapa negara Afrika

serta LSM-LSM internasional amat banyak, rajin tanpa henti dan pintar mampu meyakinkan YPJHN. Lobby memang penting. Tetapi lebih penting ialah argumentasi, sebab YPJHN bukan segerombolan orang bodoh. Dengan kata lain, lobby Indonesia perlu diperbaiki kalau hal-hal yang tidak diinginkan perlu dicegah. Tetapi lebih penting ialah kualitas perangkat argumentasi dan pembuktian praktis di lapangan, karena semua di-check. Memang akhirnya YPJHN-lah yang bertanggungjawab atas terpilihnya Ramos Horta (atau Yayasan Magsaysay dalam kasus Pram) tetapi kegigihan lobby dan kredibilitas empirik argumentasi KITA ikut menentukan juga.

Kelima, khususnya dalam dunia sastra terasa sangat, bahwa semua karya yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau yang diakui sebagai bahasa internasional (praktis Barat) memang tipis harapan untuk mendapat Hadiah Nobel. Ini bisa disebut Eropa atau Amerikasentris tetapi apa-boleh-buat-mau-apa memang seluruh aspek ipoleksosbud kehidupan di dunia ini masih Eropa atau Amerikasentris. Kita boleh saja memaki-maki, tetapi apa gunanya. Susastra kan dicipta tidak untuk meraih hadiah, meski Nobel sekalipun. Prestasi bidang fisika, kimia, ilmu kedokteran, ekonomi, perdamaian dst. pun dapat kita tingkatkan. Dengan atau tanpa ambisi mendapat Hadiah Nobel. Dan jika Pramoedya Ananta Toer yang diusulkan Prof. Teeuw yang jelas berwibawa dan bermartabat dalam bidang susastra Indonesia, agar mendapat Hadiah Nobel, ya sudilah jangan marah bila beliau memilih Pramoedya Ananta Toer, dan bukan misalnya Sapardi Djoko Damono atau Ahmad Tohari. Mestinya ada seorang profesor atau pakar susastra Indonesia yang mengusulkan penulis lain kepada YPJHN kalau Pak Pram tidak disukai. Kalau tidak ada, ya lebih baik introspeksi dan koreksi diri.

Keenam, dunia Eropa dan Barat seumumnya sejak Atlantic Charter mengakui dan berusaha (meski tidak selalu serius) untuk membela *the right of self-determination* bagi segala bangsa, suku dan golongan sampai yang minoritas Indian sekalipun. Bahwa Barat masih munaflk dan berstandar ganda, tentang itu semua orang, juga orang Barat, tahu. Tetapi seburuk-buruk mereka bangsa-bangsa yang cerdas, dinamis, generasi mudanya cepat belajar dan mudah berubah sikap bila sadar bahwa apa yang mereka anut dan kerjakan tidak rasional, tidak bermoral dan melawan prinsip-prinsip HAM atau misalnya Atlantic Charter bikinan mereka sendiri.

Negara Indonesia jaya melawan Kerajaan Belanda dan kemerdekaannya diakui oleh dunia Barat itu juga antara lain karena iklim Atlantic Charter cerdas dimanfaatkan maksimal oleh Soetan Sjahrir, Mohammad Roem, Soekarno-Hatta dan jangan lupa Jenderal Soedirman. Nah begitu pun sekarang oleh Ramos Horta dalam situasinya, biar pun RI menyatakan mayoritas penduduk Timtim pro integrasi. Bagi pemerintah Indonesia masalah Timtim sudah jelas dan tidak dapat ditawar. Tetapi bagi Barat bahkan beberapa negara Afrika yang mendukung *the right of self determination* masalah Timtim masih belum final seperti kasus Goa di India. Demikianlah otomatis iklim dekolonisasi global pasca Perang Dunia II, apalagi pasca Perang Dingin, yang bersimpati kepada siapa pun yang dianggap membela *the right of self determination* amat mudah mendapat dukungan moril masyarakat sana. Dan di sana pendapat masyarakat , tidak seperti di Indonesia, tidak mungkin disuruh sama, sebangun,

identik dengan politik pemerintah. Di sini lagi diplomasi, strategi informasi dan lobby sangat menentukan. Pak Alatas sudah berjuang maksimum dan mati-matian. Untuk itu beliau pantas mendapat bintang Mahaputera Kelas Wahid, akan tetapi kan pubic opinion masyarakat dan negara sana dan sono itu sikapnya ya sana dan sono. Tidak bisa-ditatar P4.

Ketujuh, tidak ada gunanya bagi kesebelasan sepak-bola yang sial kecolongan memaki-maki wasit atau kesebelasan lawan. Yang penting tepat ialah memperbaiki strategi, taktik dan keterampilan permainan. Hanya itu cara untuk menang. Jadi jika strategi dan taktik, selama ini ternyata toh masih belum mampu meyakinkan lembaga yang swasta pun seperti YPJHN tentang Timtim, apalagi PBB, maka mungkin kita harus belajar dari dunia sepak-bola. Kita sadar bahwa pemerintah tidak sama dengan klab sepak-bola, namun apakah beberapa pengandaian dasar tentang argumentasi dan pihak Indonesia DAN kenyataan EMPIRIK di lapangan Timtim sungguh bebas kelemahan dan efektip marnpu meyakinkan pengamat integer? Ini perlu diteliti para politikus profesional yang realis dingin dan pakar psikologi world public opinion yang tidak bermental cuma ABS (asal bapak senang, res.). Mengapa Ramos Horta dihormati dengan penghargaan begitu tinggi? Apa hanya karena YPJHN atau PBB atau World opinion tidak paham situasi Indonesia? Tidak paham atau tidak setuju? Karena apa.

Dapat dikatakan 90% orang Barat tidak suka Yasser Arafat karena ia diperkenalkan oleh lobby kuat sebagai penyebar dan pelindung terorisme. Tetapi akhimya toh Yasser Arafat menerima Hadiah Nobel Perdamaian. Banyak orang Barat kecewa dan bertanya: kami tidak mengerti, mosok teroris kok diberi Hadiah Nobel Perdamaian. Sebaliknya dunia anti Israel bertanya gusar, mengapa militer seperti jenderal panser Rabin yang dulu singa perang kok juga mendapat Hadiah Nobel yang sama? Paling gampang ialah memarahi dan menggerutui YPJHN. Tetapi strategi berdasarkan amarah dan gerutu tidak pernah strategi yang baik dan betul. Generasi Indonesia 1928 dengan pribadi-pribadi besar Soekamo, Hatta, Sjahrir, Roem, Soedirman,tidak demikian.

YB Mangunwijaya
Sumber: Jawa Pos, 21 Oktober 1996